KEBEBASAN HAK DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

DANANG FAHTUROS

IIK STRADA INDONESIA

ryancoper2033@gmail.com

Abstrak

Prinsip dari sebuah negara demokrasi adalah dengan menjunjung tinggi Konstitusi dan ideologi dalam sebuah negara. Kebebasan dalam hak sosial dan politik menjadi sebuah jaminan yang sangat diperlukan untuk dapat mencapai sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga aspirasi yang ada dapat tersalurkan dengan baik. Permasalahan yang muncul yaitu Bagaimana Prinsip Dan Jaminan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945 dan Bagaimana Dinamika Sosial Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian

kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan persoalan hukum atau permasalahan yang akan dibahas. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu negara wajib dapat mengelola dan mengendalikan dominasi iklim kapitalis agar tetap berjalan pada koridor yang tidak merugikan warga. Negara juga harus membuka dan memberdayakan ruang publik secara optimal sebagai instrumen warga dalam menyalurkan aspirasinya, serta menutup keran tumbuh suburnya praktek politik uang baik di kalangan elit politik maupun di kalangan masyarakat, karena dengan membiarkan politik uang berlangsung, maka tidak hanya berimplikasi melahirkan politisi yang korup dan mengekang hati nurani masyarakat dalam memberikan

partisipasi politiknya, namun juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis

Kata Kunci: Hak Sosial Politik; Partisipasi; Demokrasi.

Latar Belakang

Prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu serta menghargai setiap pendapat yang keluar dari pikiran setiap orang. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat atau mengemukakan pendapat merupakan hak untuk setiap WNI yang dijamin oleh UUD 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan

yang paling tinggi dalam asas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut tetap ada koridor atau batasan hukumnya. Keberadaan hak asasi manusia dalam konsepsi negara hukum dalam demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar.

Indonesia adalah negara hukum, dimanaterdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia(UUDNRI) Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi negara hukum tersebut. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara.

Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia.

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Dalam konteks Indonesia.-Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, “Kedua, padapasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.

Kasus/Masalah

Bagaimana Prinsip Dan Jaminan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945 ?

**Dinamika Sosial Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia ?
Bagaimana hubungan HAM dalam sistem Politik Demokratis?**

Bagaimana Prospek Demokratisasi di Indonesia?

Apakah Kebebasan Berekspresi Dalam Hak Asasi Manusia Dapat Dibatasi?

Tinjaun Pustaka

Pengertian Hak Secara Umum .

Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut.

Pengertian hak juga telah dipaparkan atau dijelaskan oleh beberapa pendapat ahli. Menurut Srijanti “hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.”³ Sedangkan

pengertian hak menurut Notonegoro “hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”⁴ Berdasarkan kutipan pendapat para ahli, dapat diartikan bahwa hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Sehingga dapat dikaitkan dengan hak setiap manusia dalam menyatakan pendapat serta pikirannya di muka umum sebagai warga negara. Penjabaran tersebut digunakan untuk meninjau makna dan batasan warga negara Indonesia dalam hak kebebasan berpendapat di muka umum Dalam sistem hukum di Indonesia telah diakui dan diatur terkait hak dan kewajiban. Kedua hal tersebut ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat pasal mengenai hak dan kewajiban, diantaranya adalah :

- a. Pasal 26 ayat (1) : “yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

- b. Pasal 26 ayat (2) : “syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.” c. Pasal 27 ayat (1) : “bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” d. Pasal 27 ayat (2) : “bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” e. Pasal 28 : “bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” f. Pasal 30 ayat (1) : “bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara” g. Pasal 30 ayat (2) : “pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.” Pengakuan dan pengaturan hak warga negara Indonesia yang

telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu diantaranya adalah memuat macam-macam hak 25 dan kewajiban tersebut. Setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, diantaranya adalah : a. Hak Warga Negara Indonesia 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 27 ayat 2). 2) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(Pasal 28A). 3) “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” (Pasal 28B ayat 1). 4) Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”. 5) “Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.” (Pasal 28C ayat 1) 6) “Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” (Pasal 28C ayat 2). 7) “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” (Pasal 28D ayat 1). 8) “Hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” (Pasal 28I ayat 1).9 Berdasarkan macam-macam

uraian hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat diartikan bahwasanya hak setiap warga negara Indonesia telah diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mensejahterakan hidupnya

PEMBAHASAN

Bagaimana Prinsip Dan Jaminan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945 ?

1945 Sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat tidak harus menjadi sekedar bebas mengemukakan pendapat tetapi harus bertanggung jawab dan beretika dalam berpendapat. Menentukan parameter nilai etika dalam berpendapat yang ideal sangat sulit. Setiap upaya penentuan batas nilai etika berpendapat akan divonis sebagai pengebirian berpendapat. Bahkan undang-undang baru seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

yang diciptakan oleh para ahli hukum dan pendekar demokrasi saja dianggap mengkebiri kebebasan berpendapat. Etika berpendapat tersebut tidak perlu harus sesuai dengan etika adat ketimuran atau etika kesopanan. Tetapi layaknya dalam berpendapat harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanpa harus men”justifikasi” fakta yang masih belum jelas. Artinya, dalam kebebasan berpendapat tidak boleh memutarakan balikkan fakta kebenaran yang ada. Bila hal ini terjadi akan merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Bila etika berpendapat hanya melanggar etika adat, budaya dan kesopanan tidak terlalu masalah karena sanksi yang didapat hanyalah sekedar sanksi sosial. Kebebasan berpendapat/mengemukakan pendapat merupakan hak untuk setiap WNI yang dijamin oleh UUD 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling tinggi dalam asas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut tetap ada koridor atau batasan hukumnya.

erdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, terdapat lima asas, yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu :

- 1)Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 2)Asas musyawarah dan mufakat;
- 3)Asas kepastian hak dan keadilan;
- 4)Asas proporsionalitas;
- 5)Asas mufakat

warga negara bebas mengungkapkan pendapat asal tidak bertentangan dengan falsafat yakni pancasila, UUD 1945, dan tujuan Negara Republik Indonesia

Dinamika Sosial Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia ?

Ide negara demokrasi bukanlah hal yang baru bagi Indonesia karena sejak negara ini berdiri, ide utama yang diajukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pola hubungan pemerintah-rakyat sudah didasarkan pada konsep demokrasi. Namun demokrasi yang dimaksud ialah sebuah model demokrasi yang bukan liberal,

melainkan terikat dengan nilai bangsa. Ide demokrasi Indonesia sebagaimana yang digariskan founding fathers, demokrasi Indonesia yang berintikan mass protect atau sikap kritis rakyat terhadap penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dan tolong-menolong. Demokrasi yang dilaksanakan melalui prosedur-prosedur berdasarkan hukum serta dijiwai oleh pancasila, sebagai landasan kefilosofatan dan norma kritik bagi Tata Hukum Indonesia. Oleh karena itu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan. Itu artinya argumentasi dan analisis yang lahir mesti berbasis pada : pertama metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, serta kedua didasari dengan

kepekaan yang kuat terhadap dinamika-dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural.

Bagaimana hubungan HAM dalam sistem Politik Demokratis?

Dalam sistem politik demokratis, watak hukum yang dihasilkan bersifat responsif dan akomodatif. Substansi hukum yang tertuang di dalam beragam peraturan perundangan yang ada menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. HAM menjadi salah satu ukuran penegakan hukum. Dalam sistem tersebut terjalin komunikasi serasi antara opini publik lewat wakil-wakilnya, juga media massa, agamawan, cendekiawan, dan LSM dengan pemerintah. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Pemaknaan terhadap demokrasi menuntut kemauan setiap orang untuk dapat menghindari sikap etnosentrisme. Demokrasi memberikan peluang bagi setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan yang dimilikinya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Perwujudan demokrasi dalam tataran empiris

bukanlah suatu hal yang mudah karena memerlukan waktu yang panjang serta pelaksanaan dari berbagai hal yang paradoks dalam waktu bersamaan. Hak dan kebebasan politik melahirkan ciri kedua atau dimensi kedua dari demokrasi, yaitu pluralisme politik. Karena itu ada yang mengatakan kalau tidak dijamin pluralisme, tidak ada demokrasi.

Bagaimana Prospek Demokratisasi di Indonesia?

Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Nilai-nilai demokrasi dianggap baik dan positif bagi setiap warga. Setiap warga menginginkan tegaknya demokrasi di negaranya. (Winarno, 2009:97)

Sejak kejatuhan Soeharto telah terjadi perubahan-perubahan yang berarti

dalam kehidupan politik di Indonesia. Beberapa perubahan itu membuka peluang bagi terwujudnya transisi menuju demokrasi walaupun tidak ada garansi bahwa transisi yang dimulai secara kongkrit sejak terbentuknya pemerintahan baru pasca pemilu 1999 benar-benar akan memberikan kondisi yang kondusif bagi terkonsolidasikannya demokrasi di Indonesia. Disamping itu perlu disadari bahwa reformasi yang bergulir masih diwarnai oleh berbagai distorsi dimana orang berpikir dan melangkah tanpa kendali nilai dan tanpa sisa kepercayaan pada institusi sosial yang tersedia (Sari, 2003). Pratransisi berlangsung sebelum kejatuhan rezim yang berkuasa. Biasanya dalam tahapan ini terjadi krisis ekonomi dan politik yang sulit dikelola, perlawanan yang kuat dari massa, perpecahan di tubuh elit, serta kuatnya tuntutan akan perubahan terhadap sistem politik. Sementara itu liberalisasi politik terjadi setelah pergantian rezim yang diiringi oleh meluasnya hak-hak politik rakyat. Konsolidasi demokrasi ditandai oleh tertatanya perangkat keras sistem politik secara relatif baik dan diiringi oleh terselenggaranya pemilu secara

demokratis dengan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi makin kukuh.

Apakah Kebebasan Berekspresi Dalam Hak Asasi Manusia Dapat Dibatasi?

Kebebasan berekspresi (dan beropini) merupakan salah satu kategori hak asasi manusia yang utama. Hak ini masuk dalam kategori hak asasi pertama, hak dengan dimensi sipil-politik. Kategori hak ini misalnya dapat ditemui dalam salah satu dokumen HAM acuan tertua, seperti French Declaration of The Rights of Man and Citizen of 1789 (art. 11). Meskipun hak berekspresi dianggap ‘tidak’ sefundamental hak atas hidup, hak beragama dan berkeyakinan, hak bebas dari penyiksaan, dan masih dimungkinkan untuk diderogasi, hak ini selalu menjadi pengawal utama hak-hak dasar manusia. kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat yang dinyatakan dalam pasal 19 ICCPR dan hak berorganisasi/berasosiasi (Pasal 21 ICCPR) dapat dijadikan sebagai subjek derogasi (pembatasan atau pengurangan). Subjek dari derogasi sendiri termuat dalam pasal 19, Pasal 20 dan Sub-pasal 19 dan 2. Ketentuan

dalam pasal 20 menjadi pagar pembatas kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Hal ini sangat relevan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang didalamnya berisi seruan atau propaganda untuk perang. Selain itu pembatasan dalam kebebasan berekspresi juga dibatasi dalam hal menyuarakan akan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, agama yang merupakan suatu tindakan penghasutan untuk melakukan diskriminasi.

KESIMPULAN

Pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu negara wajib dapat mengelola dan mengendalikan dominasi iklim kapitalis agar tetap berjalan pada koridor yang tidak merugikan warga. Negara juga harus membuka dan memberdayakan ruang publik secara optimal sebagai instrumen warga dalam menyalurkan

aspirasinya serta menutup keran tumbuh suburnya praktik politik uang baik di kalangan elit politik maupun di kalangan masyarakat karena dengan membiarkan politik uang berlangsung, maka tidak hanya berimplikasi melahirkan politisi yang korup dan mengekang hati nurani masyarakat dalam memberikan partisipasi politiknya, namun juga berakibat tercederainya suatu pemilu yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Sodik, M. A., & Nzilibili, S. M. M. (2017). The Role Of Health Promotion And Family Support With Attitude Of Couples Childbearing Age In Following Family Planning Program In Health. *Journal of Global Research in Public Health*, 2(2), 82-89.

Sodik, M. A., Suprpto, S. I., & Pangesti, D. (2013). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Pelayanan Prima Pegawai Di Rsi Orpeha Tulungagung. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2(1), 24-32

Attoriq, S., & Sodik, M. A. (2018). Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan Di Lahan Praktik.

Fahturosi, D. (2021). Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Untuk Mencegah Radikalisme.

Fauzan Khairazi, SH.,MH,
“Implementasi Demokrasi dan
Hak Asasi Manusia di
Indonesia”, Jurnal Inovatif Vol. 3
Nomor 1 Januari 2015. Hal 1,

Rahmanto, T. Y. (2016, Juli 1).
"Kebebasan Berekspresi Dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia:
Perlindungan, Permasalahan dan
Implementasinya di Provinsi Jawa
Barat". Jurnal Hak Asasi Manusia, 46.
Sari, Estika. (2003). “Demokrasi dan
Hak Asasi Manusia”, Demokrasi,
Vol.II, No.1